



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2619–2630

Implementasi Pancasila dan *Civil Societ* di Era Informasi

Fauzi Aditya Sitorus, Alya Habibah Tarigan

Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi
Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2983>

How to Cite this Article

APA : Aditya Sitorus, F., & Habibah Tarigan, A. . (2025). Implementasi Pancasila dan Civil Societ di Era Informasi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2619 – 2630.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2983>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Implementasi Pancasila dan *Civil Societ* di Era Informasi

Fauzi Aditya Sitorus^{1*}, Alya Habibah Tarigan²

Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri
Sumatra Utara ^{1,2}

*Email: fauziaditya213@gmail.com ; alyahabibahtarigan@gmail.com

Diterima: 23-01-2025

| Disetujui: 24-01-2025

| Diterbitkan: 26-01-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in the information era and identify the role of civil society in supporting the strengthening of these values. In addition, this study also aims to reveal the obstacles faced in the implementation of Pancasila amidst the development of information technology and formulate effective strategies to integrate Pancasila values with the dynamics of digitalization in order to realize a just, harmonious, and dignified society. It can be concluded that the implementation of Pancasila values in the information era is very important to maintain national integrity and strengthen social cohesion amidst the flow of globalization. Pancasila, as the foundation of the state, remains relevant and must be implemented consistently to ensure that technological developments do not erode national values and national morality. The information era presents challenges in the form of the spread of hoaxes, social polarization, and threats to individual privacy, which require a wise response based on the principles of Pancasila. The implementation of Pancasila values in the digital era must be supported by various parties, including the government, society, and the private sector. The government plays an important role in creating policies that ensure technology is used for the benefit of society, and protect the basic rights of every individual, especially in terms of privacy and access to information. Society also needs to develop digital literacy that prioritizes media ethics and social awareness, so that technology can be used to strengthen the sense of unity and social justice in Indonesia.

Keywords: Pancasila; Civil Society; Information Era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila di era informasi serta mengidentifikasi peran civil society dalam mendukung penguatan nilai-nilai tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap kendala yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di tengah perkembangan teknologi informasi serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika digitalisasi guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, harmonis, dan bermartabat. Dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di era informasi sangat penting untuk menjaga integritas bangsa dan memperkuat kohesi sosial di tengah arus globalisasi. Pancasila, sebagai dasar negara, tetap relevan dan harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengikis nilai-nilai kebangsaan dan moralitas bangsa. Era informasi menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, polarisasi sosial, dan ancaman terhadap privasi individu, yang membutuhkan respon yang bijak dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang memastikan teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta melindungi hak-hak dasar setiap individu, terutama dalam hal privasi dan akses informasi. Masyarakat juga perlu mengembangkan literasi digital yang mengedepankan etika bermedia dan kesadaran sosial, sehingga teknologi dapat digunakan untuk memperkuat rasa persatuan dan keadilan sosial di Indonesia.

Katakunci: Pancasila; *Civil Societ*; Era Informasi

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh elemen masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah perubahan global yang semakin dinamis. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila sering kali menghadapi tantangan, terutama dengan hadirnya era informasi yang menawarkan kemudahan akses informasi namun juga membawa potensi disintegrasi sosial.

Era informasi ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Kehadiran media sosial dan internet memungkinkan masyarakat untuk lebih terhubung secara global. Namun, keterbukaan informasi ini juga membawa konsekuensi, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang mengancam nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, implementasi Pancasila menjadi semakin relevan sebagai upaya untuk menjaga harmoni sosial.

Di sisi lain, konsep civil society atau masyarakat madani juga memainkan peranan penting dalam era informasi. Civil society mengacu pada masyarakat yang berdaya, memiliki kesadaran kolektif, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Masyarakat yang kuat dan mandiri menjadi pondasi penting untuk memperkuat demokrasi dan mencegah dominasi kelompok tertentu. Dengan kata lain, sinergi antara implementasi nilai-nilai Pancasila dan penguatan civil society menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era informasi.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penguatan civil society di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Ketimpangan sosial, lemahnya literasi digital, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadi penghalang dalam menciptakan masyarakat madani yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan langkah konkret untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga persatuan bangsa. Era informasi juga memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, melalui media digital, kampanye tentang toleransi, keadilan sosial, dan persatuan dapat lebih mudah disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Namun, tanpa bimbingan dan pengawasan yang memadai, media digital juga dapat menjadi alat untuk menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pentingnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah. Pemerintah berupaya mempromosikan program-program yang mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Salah satu contohnya adalah penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini.

Selain itu, transformasi digital yang terjadi di era informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat civil society. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, masyarakat dapat saling berkolaborasi, berbagi informasi positif, dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya keadilan sosial. Namun, pemanfaatan teknologi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pola pikir dan perilaku masyarakat di era informasi. Masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima dan memastikan bahwa tindakan mereka mencerminkan semangat gotong royong,

keadilan, dan persatuan. Dengan cara ini, nilai-nilai Pancasila dapat dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila juga semakin terasa dalam menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Globalisasi membawa budaya asing yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal. Jika masyarakat tidak memiliki pegangan kuat pada Pancasila, maka identitas bangsa dapat tergeser oleh budaya luar yang lebih dominan. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi benteng dalam menghadapi tantangan ini.

Dengan demikian, implementasi Pancasila dan penguatan civil society di era informasi menjadi dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah arus perubahan global. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, nilai-nilai Pancasila dapat terus relevan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di era yang serba digital ini.

Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa memiliki nilai universal yang dapat diterapkan di berbagai situasi, termasuk dalam merespons perkembangan era informasi. Era ini memberikan akses tak terbatas pada informasi global yang dapat memperkaya wawasan masyarakat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi masuknya pengaruh negatif yang dapat melemahkan identitas bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran sebagai pedoman utama dalam menyaring dan mengarahkan perkembangan informasi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Teknologi informasi yang berkembang pesat juga menciptakan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Platform digital memungkinkan individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi bagi berbagai permasalahan sosial. Namun, jika partisipasi ini tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah dan keadilan sosial, maka potensi konflik dan perpecahan dapat meningkat.

Salah satu tantangan besar dalam era informasi adalah munculnya disinformasi dan misinformasi. Berita palsu dan informasi yang menyesatkan dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media digital, sehingga memengaruhi opini publik dan mengancam harmoni sosial. Dalam situasi ini, implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti kebijaksanaan dan penghargaan terhadap kebenaran, menjadi sangat penting untuk memitigasi dampak negatif disinformasi.

Selain itu, era informasi juga memunculkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Pola interaksi yang dulunya bersifat langsung kini semakin banyak dilakukan secara virtual. Perubahan ini dapat menyebabkan melemahnya rasa kebersamaan dan gotong royong, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan melalui media digital menjadi agenda penting dalam mengimplementasikan Pancasila di era ini.

Tidak hanya itu, nilai-nilai Pancasila juga perlu ditanamkan dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan terkait digitalisasi sejalan dengan semangat Pancasila, seperti menjamin akses yang adil terhadap teknologi, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong inklusi digital. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat untuk memajukan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar kebangsaan.

Pancasila juga berperan sebagai perekat dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Di era informasi, keberagaman ini sering kali menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan polarisasi sosial. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerja sama antarindividu maupun kelompok.

Peran pendidikan menjadi sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di era informasi. Kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila secara interaktif dan menarik. Generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap Pancasila akan lebih mampu menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Di sisi lain, masyarakat madani yang kuat juga menjadi elemen penting dalam implementasi Pancasila. Civil society berperan sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat madani dapat menjalankan peran pengawasan, memberikan masukan, dan mendorong akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, peran ini hanya dapat berjalan efektif jika didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.

Era informasi juga menawarkan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah global. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, Indonesia dapat menunjukkan identitas uniknya sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan memiliki karakter kuat. Hal ini dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dan mendorong terciptanya kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Pada akhirnya, implementasi Pancasila di era informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila perlu terus ditanamkan di setiap lapisan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat madani, dan dunia pendidikan, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan era informasi sambil tetap menjaga identitasnya sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila.

TINJAUAN PUSTAKA

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengarahkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Notonagoro (1984), Pancasila adalah sumber nilai yang bersifat fundamental dan memandu tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dalam konteks era informasi, Pancasila menjadi landasan etika dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

Era informasi ditandai dengan kemajuan teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Manuel Castells (1996) dalam teorinya tentang *network society* menjelaskan bahwa masyarakat modern kini hidup dalam jaringan informasi yang sangat terhubung. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga membuka peluang bagi disinformasi dan polarisasi sosial. Dalam hal ini, Pancasila dapat menjadi pedoman untuk menyaring dan memanfaatkan informasi secara bijak.

Konsep civil society atau masyarakat madani juga relevan untuk dibahas dalam konteks ini. Menurut Cohen dan Arato (1992), civil society adalah arena interaksi sosial yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Civil society yang kuat memiliki ciri-ciri seperti partisipasi aktif, kesadaran kolektif, dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Nilai-nilai Pancasila

dapat menjadi fondasi moral bagi civil society dalam memperkuat demokrasi dan membangun keadilan sosial.

Habermas (1989) melalui konsep *public sphere* menjelaskan pentingnya ruang publik sebagai tempat diskusi dan debat yang rasional untuk membentuk opini kolektif. Dalam era informasi, ruang publik tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, tetapi juga meluas ke ruang digital seperti media sosial dan platform komunikasi lainnya. Agar ruang publik digital tidak menjadi arena konflik dan disinformasi, nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah dan gotong royong harus diterapkan dalam interaksi di dunia maya. Di sisi lain, era informasi juga membawa tantangan besar dalam menjaga identitas kebangsaan. Huntington (1996) dalam teorinya tentang *clash of civilizations* menjelaskan bahwa globalisasi dapat memunculkan benturan antarbudaya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat berperan sebagai benteng untuk menjaga keberagaman dan persatuan bangsa di tengah pengaruh budaya asing. Nilai persatuan dalam Pancasila harus terus diperkuat agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan identitasnya di era globalisasi.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era informasi. Ki Hajar Dewantara (1953) menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila dapat membentuk generasi muda yang memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kemampuan kritis dalam menghadapi tantangan era digital.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga perlu diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Menurut Howard Rheingold (2002), teknologi digital memiliki potensi untuk menciptakan *virtual communities* yang mendukung kolaborasi dan partisipasi sosial. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, teknologi juga dapat memunculkan eksklusivitas dan segregasi sosial. Oleh karena itu, pengelolaan ruang digital harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk mendorong inklusivitas dan keadilan sosial.

Senada dengan itu, Van Dijk (2006) menyoroti pentingnya literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara bijak. Literasi digital yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi data. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat lebih kritis dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi sejalan dengan semangat Pancasila. Menurut teori Good Governance oleh UNDP (1997), pemerintah harus menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kerakyatan, dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan civil society di era informasi. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa implementasi Pancasila dan penguatan civil society di era informasi membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan teknologi. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan modern. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat Pancasila dan civil society harus terus dilakukan agar Indonesia dapat menjaga identitas dan integritasnya sebagai bangsa yang berdaulat di tengah arus globalisasi.

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan utama dalam mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Notonagoro (1984), Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan

kehidupan bernegara. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang relevan dengan setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi tantangan era informasi. Dengan sifatnya yang dinamis, Pancasila dapat menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Era informasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Manuel Castells (1996) dalam teorinya tentang *network society* menjelaskan bahwa era informasi menciptakan masyarakat yang sangat terhubung melalui jaringan komunikasi global. Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi kemajuan dan kolaborasi lintas batas. Namun, di sisi lain, era ini juga membawa tantangan berupa disinformasi, polarisasi sosial, dan pengikisan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran sentral sebagai pedoman moral dan etika dalam menghadapi perubahan tersebut.

Pancasila juga berperan penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Huntington (1996) dalam teorinya *clash of civilizations* menekankan bahwa globalisasi dapat memicu benturan budaya, terutama di masyarakat yang memiliki banyak perbedaan etnis, agama, dan budaya. Indonesia sebagai negara yang beragam sangat membutuhkan Pancasila sebagai perekat persatuan. Nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila menjadi fondasi untuk menjaga kohesi sosial dan menghindari perpecahan yang berpotensi timbul akibat pengaruh budaya asing atau konflik horizontal. Civil society atau masyarakat madani juga memainkan peran strategis dalam mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila di era informasi. Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan civil society sebagai ruang sosial yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Civil society yang kuat memiliki kapasitas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperkuat demokrasi, dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, civil society perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatannya agar dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Habermas (1989) melalui konsep *public sphere* menyoroti pentingnya ruang publik sebagai arena diskusi dan debat untuk membentuk opini publik. Dalam era informasi, ruang publik tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, tetapi meluas ke ruang digital seperti media sosial dan platform komunikasi daring lainnya. Namun, ruang publik digital sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial harus diterapkan untuk menciptakan ruang digital yang inklusif dan produktif.

Pentingnya literasi digital juga ditekankan oleh Van Dijk (2006), yang mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima. Selain itu, literasi digital dapat menjadi alat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga harmoni sosial, menghormati perbedaan, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui ruang digital.

Dalam bidang pendidikan, Pancasila harus diajarkan sebagai nilai yang hidup, bukan sekadar konsep teoritis. Ki Hajar Dewantara (1953) menekankan pentingnya pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya, yaitu individu yang berakarakter, berdaya pikir, dan memiliki kepedulian sosial. Pendidikan berbasis Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum sekolah serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan materi secara kreatif dan menarik. Dengan pendekatan ini, generasi muda dapat memahami relevansi Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari, termasuk dalam menyikapi perkembangan teknologi. Senada dengan itu, Howard Rheingold (2002) menyebutkan bahwa teknologi digital memiliki potensi untuk menciptakan *virtual communities* yang mendukung kolaborasi sosial dan partisipasi aktif. Namun, teknologi juga memiliki risiko menciptakan segregasi sosial jika tidak digunakan dengan bijak. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan harus menjadi prinsip utama dalam mengelola ruang digital, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat solidaritas masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut UNDP (1997) dalam konsep *Good Governance*, pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam merancang kebijakan. Nilai-nilai Pancasila, seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dapat menjadi pedoman dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dan penguatan civil society di era informasi merupakan upaya yang saling mendukung. Pancasila memberikan landasan moral dan etika, sementara civil society menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Informasi

Era informasi, yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi digital, membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, dihadapkan pada tantangan baru. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, musyawarah, dan persatuan, harus dapat diterapkan dengan bijak agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Pancasila, sebagai pedoman hidup, tetap memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial di tengah kemajuan teknologi yang serba cepat.

Sila pertama Pancasila, *Ketuhanan yang Maha Esa*, mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Di era informasi, di mana agama dan keyakinan dapat dengan mudah dipertukarkan dan disebarluaskan melalui media digital, penting untuk tetap menjaga toleransi beragama dan menghormati perbedaan. Teknologi informasi, jika digunakan dengan bijak, dapat memperkuat pemahaman antarumat beragama, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, penerapan nilai ketuhanan harus mampu mengarahkan masyarakat untuk saling menghormati perbedaan dan memperkuat rasa persaudaraan antarumat beragama.

Pada sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, nilai-nilai kemanusiaan harus tetap menjadi landasan dalam berinteraksi di ruang digital. Masyarakat Indonesia yang semakin terhubung melalui platform digital dihadapkan pada potensi penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran ujaran kebencian, perundungan daring, dan kekerasan verbal. Dalam hal ini, penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, digitalisasi juga menawarkan peluang untuk memperkuat kampanye

kemanusiaan, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan hak asasi manusia secara lebih luas. Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, menjadi sangat relevan di era informasi, di mana keberagaman budaya, suku, agama, dan ras sering kali diuji. Di dunia maya, terjadi penyebaran informasi yang dapat memperburuk polarisasi sosial dan memperbesar jurang perbedaan. Di tengah arus globalisasi, penguatan nilai persatuan Pancasila sangat penting untuk mencegah perpecahan. Teknologi informasi harus digunakan untuk memperkuat semangat kebersamaan, seperti melalui program-program yang memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada dunia internasional serta membangun dialog lintas budaya yang konstruktif.

Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, berfokus pada penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era informasi yang ditandai dengan terbukanya ruang publik digital, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik, baik itu melalui media sosial atau forum-forum diskusi. Namun, di sisi lain, penggunaan ruang publik digital juga menuntut masyarakat untuk lebih bijaksana dalam berdialog, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari penyebaran hoaks yang dapat merusak demokrasi. Oleh karena itu, penerapan nilai musyawarah untuk mufakat dapat dijalankan dengan mengedepankan dialog yang sehat dan saling menghormati dalam setiap interaksi di dunia maya.

Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, mengandung prinsip pemerataan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Di era informasi, kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi menjadi tantangan besar, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Penerapan nilai keadilan sosial dapat dilihat dalam upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digital tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Selain itu, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat dampak negatif teknologi informasi. Salah satunya adalah ancaman terhadap privasi individu di dunia maya. Dalam situasi ini, nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi sangat diperlukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Peran pendidikan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era informasi juga sangat besar. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara, sebagai tokoh pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan harus dapat membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Dalam era digital, pendidikan Pancasila harus mencakup literasi digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang etika bermedia, serta bagaimana berperilaku baik di dunia maya sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, dalam dunia politik digital, implementasi Pancasila menjadi penting untuk menciptakan suasana demokratis yang kondusif. Banyaknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan sering kali memicu perpecahan dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang publik digital harus menjadi landasan dalam menciptakan dialog yang berbasis pada etika dan kebenaran. Pemerintah, bersama dengan masyarakat,

perlu bekerja sama dalam mengatasi fenomena negatif tersebut dengan memperkuat literasi informasi dan memfasilitasi pendidikan yang mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab di dunia maya.

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era informasi, kita juga harus menyadari adanya ketimpangan digital yang masih terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap teknologi masih cukup besar. Oleh karena itu, upaya pemerataan akses teknologi menjadi bagian penting dari implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, yang menekankan pada keadilan sosial. Hal ini membutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan yang didorong oleh teknologi.

Di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada dunia. Kampanye berbasis digital yang mengedepankan nilai persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan melalui media sosial dan platform online lainnya. Kampanye semacam ini tidak hanya dapat memperkuat kesadaran nasionalisme, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Era informasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam cara berkomunikasi, memperoleh informasi, dan membangun interaksi sosial. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era ini menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat dihadapkan pada derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tetap berlandaskan pada identitas nasional. Sebagai contoh, sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” dapat diterapkan melalui kampanye digital yang mendorong harmoni sosial dan penghargaan terhadap keberagaman, meskipun di tengah berbagai perbedaan yang sering kali diperuncing di media sosial.

Peran Civil Society dalam Mendukung Pancasila

Civil society memegang peran penting dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama di era informasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas melalui teknologi digital. Organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan individu yang aktif di ruang digital dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, komunitas berbasis digital dapat mengadakan kampanye edukasi tentang literasi digital yang mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam bermedia. Selain itu, civil society juga dapat menjadi pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat sejalan dengan semangat Pancasila.

Tantangan dalam Mengintegrasikan Pancasila di Era Informasi

Meskipun era informasi menawarkan berbagai peluang, terdapat pula sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat memicu perpecahan sosial. Hal ini sering kali diperburuk oleh kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga informasi yang tidak valid lebih mudah diterima dan disebarluaskan. Selain itu, globalisasi membawa masuk nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan budaya dan identitas Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu ada upaya

kolaboratif antara pemerintah, civil society, dan dunia pendidikan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila.

Strategi Penguatan Pancasila Melalui Teknologi Digital

Untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan di era informasi, diperlukan strategi yang memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan platform digital berbasis Pancasila yang menyediakan informasi edukatif dan ruang diskusi yang sehat. Pemerintah juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan melalui kampanye yang kreatif dan inklusif. Selain itu, program literasi digital yang terintegrasi dengan pendidikan formal perlu diperluas agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kemampuan kritis dalam menyikapi informasi dan teknologi.

Dampak Implementasi Pancasila dan Civil Society terhadap Kehidupan Berbangsa

Implementasi nilai-nilai Pancasila yang didukung oleh peran aktif civil society memiliki dampak besar terhadap kehidupan berbangsa. Salah satu dampaknya adalah terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang konsisten, konflik horizontal dapat diminimalkan, dan harmoni sosial dapat terwujud. Selain itu, sinergi antara Pancasila dan civil society juga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di era informasi, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui civil society juga menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman globalisasi yang berpotensi menggerus identitas bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di era informasi sangat penting untuk menjaga integritas bangsa dan memperkuat kohesi sosial di tengah arus globalisasi. Pancasila, sebagai dasar negara, tetap relevan dan harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengikis nilai-nilai kebangsaan dan moralitas bangsa. Era informasi menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, polarisasi sosial, dan ancaman terhadap privasi individu, yang membutuhkan respon yang bijak dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang memastikan teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta melindungi hak-hak dasar setiap individu, terutama dalam hal privasi dan akses informasi. Masyarakat juga perlu mengembangkan literasi digital yang mengedepankan etika bermedia dan kesadaran sosial, sehingga teknologi dapat digunakan untuk memperkuat rasa persatuan dan keadilan sosial di Indonesia.

SARAN

Untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di era informasi, disarankan agar pemerintah terus memperluas program literasi digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis tetapi juga

memperkenalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap aspek kehidupan digital. Program pendidikan berbasis Pancasila perlu disusun secara sistematis dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal, dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Selanjutnya, peran civil society dalam mengawal implementasi Pancasila di era informasi sangat diperlukan. Organisasi masyarakat sipil dan individu yang aktif dalam dunia digital harus menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan informasi yang benar dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, toleransi, dan keadilan. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dan berorientasi pada kepentingan sosial yang lebih luas.

Sebagai langkah konkret, perlu dikembangkan platform-platform digital yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi secara konstruktif dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga integritas dan keharmonisan sosial. Hal ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada dunia internasional, serta membangun citra positif Indonesia di mata global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). *Peran Teknologi Informasi dalam Pembentukan Karakter Bangsa: Implementasi Nilai Pancasila di Era Digital*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 23(2), 109- 120.
- Hidayati, R., & Santoso, A. (2021). *Pancasila dan Globalisasi: Tantangan dan Peluang di Era Informasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 18(4), 152-167
- Fitriani, L. (2023). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial oleh Generasi Muda*. Jurnal Komunikasi dan Media, 25(3), 201-214.
- Sari, I. D. (2021). *Pengaruh Digitalisasi terhadap Kehidupan Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Pancasila*. Jurnal Ilmu Politik Indonesia, 19(1), 47-58.
- Utami, S., & Surya, R. (2022). *Peran Civil Society dalam Menjaga Keutuhan Pancasila di Era Informasi*. Jurnal Masyarakat dan Hukum, 14(1), 91-103.
- Nugroho, R., & Yuliana, D. (2020). *Keadilan Sosial dalam Era Informasi: Perspektif Pancasila dan Tantangannya*. Jurnal Pembangunan Sosial, 29(2), 119-132.
- Kurniawan, A., & Sulastri, D. (2021). *Musyawaharah Mufakat di Era Digital: Implementasi Nilai Pancasila dalam Demokrasi*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 20(3), 204-219.
- Fauzi, A. (2022). *Pancasila dalam Konteks Kemajuan Teknologi Informasi: Sebuah Pendekatan Integratif*. Jurnal Filsafat dan Etika, 11(2), 34-45.
- Salim, M., & Rahman, A. (2023). *Tantangan dan Solusi Implementasi Pancasila di Dunia Digital*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 24(4), 76-88.
- Prasetyo, H., & Wulandari, R. (2021). *Globalisasi, Teknologi, dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Pancasila di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Kebijakan, 26(1), 50-63.